

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam sebuah negara, keberadaan suatu kelompok atau komunitas tertentu selalu memberikan peranan dengan caranya terhadap proses penyelenggaraan negara tersebut. Bahkan tidak sedikit negara yang terbentuk oleh dominasi suatu kelompok/aliran tertentu sehingga terkadang dinamika suatu komunitas dengan aliran tertentu bisa mempengaruhi arah kebijakan suatu negara.

Organisasi nahdatul ulama yang merupakan salah satu organisasi terbesar di ASIA Tenggara merupakan contoh yang nyata dari pengertian diatas. Sejarah Indonesia pernah mencatat bahwa pemimpin organisasi tersebut pernah menjadi pimpinan negara dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi politik Luar Negeri Indonesia secara signifikan.

Hadirnya kaum Kurdi di Irak juga mempengaruhi pasang surut politik negara tersebut. Pergolakan kaum Kurdi di Irak merupakan masalah kronis sejak akhir Perang Dunia I, dan selalu menjadi duri dalam daging. Benturan hidup yang begitu keras di mana-mana menyebabkan masyarakat Kurdi digambarkan sebagai minoritas tanpa hak, atau suku bangsa tanpa tanah air. Mereka hidup terpencar-pencar di berbagai negara. Kehadiran komunitas Kurdi yang terpecah itu merupakan akibat politik pemecahbelahan, divide et impera, kaum kolonial.

Sebagai masyarakat yang memiliki identitas kultural, bahasa dan sejarah, komunitas Kurdi di Irak Utara mempunyai impian besar mendirikan negara sendiri.

terlaksanakan karena pada masa pemerintahan Saddam Hussein, etnis Kurdi selalu mendapatkan tekanan dan ancaman keras atas keinginannya merdeka. Hingga enam dasa warsa kemudian, aspirasi kemerdekaan etnis Kurdi belum pernah padam. Presiden Saddam Hussein hanya mampu meredam dengan kekerasan. Antara lain menebar gas beracun tahun 1990. Kekejaman rezim Saddam terhadap Etnis Kurdi benar-benar menimbulkan penderitaan terhadap mereka.

Meski perjuangan pemisahan diri kaum Kurdi sejauh ini tidak memperlihatkan keberhasilan, gerakan pemberontakan itu seakan mendapat angin segar ketika AS-Inggris menggempur Irak.

Pasca jatuhnya pemerintahan Saddam Hussein pada tahun 2003, Etnis Kurdi benar-benar dapat bernafas lega karena dengan ini, Presiden Bush menjanjikan kepada rakyat Irak untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, tentu Etnis Kurdi berhak ikut serta dan sudah sepantasnya mendapatkan peran strategis di Irak yang diharapkan akan lebih tinggi dari hak otonomi yang didapatnya pada tahun 1991, maka dari itu Kurdi benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan besar untuk berupaya keras memperjuangkan peranannya di Irak.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk tema tersebut dengan menarik judul **“Upaya Etnis Kurdi untuk memperoleh peran politik di Irak pasca rezim Saddam Hussein”**.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian tentang upaya Etnis Kurdi untuk memperoleh peran dalam pembangunan di Irak pasca Saddam Hussein ini dilakukan penulis bertujuan untuk :

1. Memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis tentang metodologi dan teori-teori hubungan Internasional terutama yang berhubungan dengan Etnis Kurdi dan Peranannya dalam politik di Irak pasca Saddam Hussein.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan yang didapatkan oleh Etnis Kurdi dalam membangun Irak Pasca-Saddam dan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh Etnis Kurdi untuk mendapatkan haknya.
3. Penulisan ini dimaksudkan untuk memperbanyak bahan-bahan kajian dengan tema yang sesuai dengan mata kuliah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### C. Latar Belakang Masalah

Kurdi adalah satu kelompok etnis yang menganggap diri mereka penduduk asli suatu daerah yang sering dirujuk sebagai Kurdistan. Kurdistan adalah wilayah dari rakyat Kurdi yang terletak di barat daya Asia, suatu wilayah yang meliputi sebagian Iran, Irak, Syria, dan Turki. Komunitas Kurdi juga dapat ditemukan di Lebanon, Armenia, Azerbaijan (Kalbajar dan Lachin, sebelah barat Nagorno Karabakh) dan, pada beberapa dasawarsa terakhir, beberapa negara-negara Eropa serta Amerika Serikat. Secara etnis, kaum ini memiliki hubungan dengan suku bangsa Iran. Kurdi merupakan suku semi-nomaden dan penganut Islam Sunni ortodoks yang menggunakan bahasa : گزیریاب Pârızgah yaitu bahasa Indo-Eropa dari cabang bahasa Iran.

Pada era sebelum abad ke tujuh, hampir seluruh Kurdistan dikuasai oleh bangsa Arab. Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian Kurdistan menjadi bagian

dari Imperium Dinasti Ottoman. Setelah runtuhnya Dinasti Ottoman, Kurdistan berada di bawah pengaruh kekuasaan Inggris. Sepanjang sejarah, bangsa Kurdi selalu memperjuangkan kemerdekaannya, dan telah berperang melawan Sumeria, Asyur, Persia, Mongolia, Tentara Salib Eropa, serta Turki. Dengan jumlah perkiraan 30 juta orang, kaum Kurdi merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di dunia yang tidak memiliki negara-bangsa sendiri.<sup>1</sup>

Pergolakan suku Kurdi merupakan masalah kompleks yang berakar jauh dalam sejarah. Bangsa Kurdi merasa sebagai korban sejarah penjajahan, yang telah memecah belah kesatuan dan wilayahnya. Politik memecah belah yang dilakukan penjajah, terutama Inggris, sejak akhir Perang Dunia I. Bahkan Inggris sengaja melupakan janjinya terhadap kaum Kurdi atas negara merdeka atau otonomi luas. Pada Perjanjian Lausanne (24 Juli 1924), yang memecah-mecah bekas kekuasaan Turki ke tangan Inggris dan Prancis, tidak menyinggung nasib etnis Kurdi. Justru secara implisit, mengucilkan etnis Kurdi, selain tidak memiliki negara sendiri, Kurdi juga dibiarkan teraniaya di negara-negara yang ditinggalinya seperti Turki, Irak, Iran.

Para pakar sejarah Kurdi menganggap Perjanjian Lausanne sebagai skenario besar untuk menguasai Timur Tengah, sekaligus melumpuhkan militansi Kurdi, yang di masa lampau sanggup melahirkan orang-orang besar sekaliber Salahuddin al-Ayyubi, musuh terbesar Pasukan Salib Eropa.<sup>2</sup>

Para penguasa Irak, Iran, dan Turki pun diarahkan untuk menekan etnis Kurdi. Pembantaian terhadap etnis Kurdi merupakan peristiwa biasa di ketiga negara

---

<sup>1</sup> Mustafa Abdul Rahman, "Artikel : Masa Depan Etnis Kurdi Pasca-Saddam", Kompas, minggu 13 April 2003.

<sup>2</sup> *Kini Irak Dipimpin Tokoh Pejuang Kurdi "Mampukah Jalal Talabani Menyerap Kepiawaiannya Salahuddin al-Ayyubi"?* (Kamis, 14 April 2005) diambil dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/14/index.htm>

tersebut, terutama di Irak, pada masa kejayaan Saddam Hussein 1979-2000, posisi Kurdi dalam pemerintahan Irak benar-benar mendapatkan banyak tekanan. Kawasan Kurdistan, di lembah Pegunungan Zagros, utara Irak, berbatasan dengan Turki dan Iran, tak pernah sepi dari serangan tentara Irak. Kota-kota Erbil, Mosul, Sulaimaniyah, dan Kirkuk, berkali-kali dibombardemen.

Di mata dunia, Kurdi adalah potret etnis yang malang. Sedihnya lagi kepentingan Etnis Kurdi sering diabaikan oleh pemerintah Irak, khususnya pada masa Saddam Hussein. Akibatnya gampang ditebak, mereka ingin memisahkan diri dari negara Irak lalu mendirikan negara Kurdi. Tentu saja keinginan mereka, yang dinilai sebagai gerakan separatisme, segera ditentang oleh Irak. Bahkan tidak hanya ditentang, tetapi juga ditumpas. Itulah yang menyebabkan Saddam membunuh kawasan utara yang didiami Kurdi karena mereka dianggap sebagai separatisme yang dapat mengancam kesatuan Irak.

Selama perjuangan menuntut kemerdekaan yang meletus menjadi perang (1922, 1930, dan 1932), etnis Kurdi selalu menemukan jalan buntu. Hingga perjuangan bersenjata berubah menjadi perjuangan politik dan diplomasi tahun 1955, tetap saja etnis Kurdi menjadi sasaran kekejaman. Jalal Talabani sendiri, termasuk salah seorang korban. Ia dipenjarakan pada tahun 1956-1958. Selanjutnya Talabani bergabung dengan milisi bersenjata Kurdistan, Peshmerga, dan mengalami beberapa puluh kali pertempuran melawan pasukan Irak, sejak Presiden Abdul Karim Kasim (1960), Presiden Abdul Salam Arief (1968), hingga Presiden Saddam Hussein (1980-an).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kini Irak Dipimpin Tokoh Pejuang Kurdi "Mampukah Jalal Talabani Menyerap Kepiawaian Salahuddin al-Ayyubi"? (Kamis, 14 April 2005) diambil dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/14/index.htm>

Pada tanggal 16 maret 1988 merupakan hari jum`at berdarah bagi Etnis Kurdi. Pembantaian kejam dan tak berprikemanusiaan itu terjadi di kota Halabja yang berpenduduk 120.000 orang. Tragedi ini merupakan simbol dari kekejaman Saddam Hussein. Ia memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh sepupunya sendiri, Jenderal Ali Hassan Al-Majeed. Semenjak memimpin penyerangan terhadap orang-orang Kurdi, ia mendapat nama baru "Chemical Ali" dialah yang membasmi orang-orang Kurdi menggunakan gas beracun. Pesawat-pesawat tempur menjatuhkan senjata kimianya diatas kota. Serangan itu berlanjut, siang dan malam, sampai tanggal 19 maret. Tidak hanya berakhir sampai disitu karena eksodus besar-besaran kembali terjadi pada tahun 1991 itu merupakan eksodus kedua bagi orang-orang Kurdi di Irak utara.<sup>4</sup> Kembali rakyat kurdi khususnya wanita-wanita Kurdi dan anak-anak kecil yang tidak berdosa menjadi korban Saddam Hussein.

Menurut pengamatan internasional dalam memperkirakan korban dari serangan bom kimia tentara Irak mencapai 5.000 orang, selama serangan militer yang diberi nama sandib"Anfal". Bahkan ada catatan lain yang menyatakan bahwa korban tewas sampai 6.800 dan sebagian besar dari mereka adalah penduduk sipil. Senjata kimia yang digunakan untuk membunuh orang-orang Kurdi adalah senjata Biologi dan kimia yang mematikan : anthrax, gas saraf VX, aflaktoksin botulinum toksin, sarin dan gas mustard.<sup>5</sup>

Tindakan pemerintah Saddam waktu itu membuat suku Kurdi tergolong sebagai suku bangsa yang tertindas di negeri sendiri. Kalau melihat catatan sejarah Islam, akan kita temukan adanya pahlawan besar Islam yang bernama Shalahudin Al-

---

<sup>4</sup> Trias Kuncahyono, *Bulan Sabit Di atas Baghdad hal: Negeri yang terbagi*, Penerbit Buku Kompas. (Jakarta April 2005) , hal : 165.

<sup>5</sup> Ibid

Ayubi yang notabene beretnis Kurdi, juga ada Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang kesohor dari suku Kurdi. Dengan kata lain salah seorang anak suku Kurdi pernah menjadi orang yang sangat berjasa pada dunia Islam. Kini anak keturunan Shalahudin dan Ibnu Taimiyah bernasib malang, ditindas di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Islam di Timur Tengah.

Pada masa kejayaan Saddam Hussein peran Kurdi dalam politik sangat mendapatkan tekanan yang tajam. Tidak hanya tertekan secara batin tetapi juga secara lahiriah. Bagi partai-partai berbasis Kurdi selalu mendapatkan perlakuan buruk dan sering kali mendapat tuduhan sebagai gerakan separatisme oleh Saddam Hussein. Kawasan Kurdistan, di lembah Pegunungan Zagros, utara Irak, berbatasan dengan Turki dan Iran, tak pernah sepi dari serangan tentara Irak. Kota-kota Erbil, Mosul, Sulaimaniyah, dan Kirkuk, berkali-kali dibombardemen karena tuduhan separatisme yang dikobarkan Uni Patriot Kurdistan pimpinan Jalal Talabani dan Partai Demokrasi Kurdistan pimpinan Masoud Barzani.

Selain itu, partai Kurdi tidak pernah mendapatkan posisi atau peran politik dalam parlemen di Irak pada masa Saddam. Pada masa Saddam, mereka hanya dapat berpolitik dalam ruang lingkup yang terbatas yaitu hanya dapat mengaspirasikan politik mereka melalui pemilu di kawasan regional otonomi luas orang Kurdi di Irak utara. Saddam selalu berupaya untuk membujuk dua partai Kurdi ini untuk bergabung dengan pemerintah Baghdad namun dengan syarat tidak menuntut kemerdekaan lagi dan menguburkan impian mereka terhadap kembalinya Kirkuk kerangkulannya orang Kurdi. Hal ini memang tidak mungkin dapat diterima orang Kurdi, sehingga dapat dipastikan tawaran Saddam untuk bekerja sama justru berbalik menjadi konflik Kurdi dengan Saddam. Saddam yang sangat memerangi keinginan orang Kurdi untuk

memerdekakan diri di Irak Utara, sering mengambil jalan-jalan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Politik marginalisasi yang dilakukan rezim Baghdad ini membuat Kurdi semakin sulit memperjuangkan aspirasi mereka. Sehingga memaksa partai Kurdi khususnya UPK pimpinan Jalal Talabani kerap melakukan gerakan bawah tanah untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan Saddam di Irak khususnya Irak Utara. Seperti pada keberpihakan orang Kurdi terhadap Iran dalam Perang Teluk I dan II. Kurdi yang mempermudah akses keluar masuk pasukan Iran ke Baghdad melalui wilayah Kurdi di Irak Utara, membuat Irak sangat kewalahan dengan aksi mereka.

Uni Patriotik Kurdistan (UPK) dan Partai Demokrasi Kurdistan (PDK) merupakan dua partai terbesar diantara 29 partai yang menyongsong Kurdi. PDK didirikan pada tahun 1946 oleh Mullah Mustafa Barzani, tujuan utama partai ini adalah mendirikan negara merdeka Kurdistan dan UPK didirikan pada bulan Maret 1975 sebagai kelompok oposisi Leninis terhadap kelompok Barzani, dan UPK lebih memperjuangkan dan menuntun system federal di Irak dan kini dipimpin oleh Jalal Talabani.<sup>6</sup> Namun diantara mereka sering sekali terjadi perselisihan untuk merebutkan wilayah kekuasaan di Kurdistan.

Kehadiran PDK-Irak diakui oleh pemerintah Baghdad setelah terjadi kudeta tahun 1958. Tahun 1970 PDK berdamai dengan Baghdad dengan imbalan diakui berkuasa di wilayah Kurdistan dan disertakan dalam pemerintahan di Baghdad. Namun banyak ketidak sepakatan yang terjadi antara PDK dan pemerintah Irak. Setelah Perang Teluk 1991, UPK kembali bersatu dengan PDK-Irak. Dalam pemilu

---

<sup>6</sup> "Bagaimanakah Saddam Menanggapi Kekalahan Irak?", (18 September 2007); diambil dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/13/Eksp/254197.htm>



1992, kedua partai tersebut meraih 50 kursi di pemerintahan regional Kurdistan dengan ibu kota Arbil. Namun kedua koalisi ini kerap dirundung pesetruan.

Menurut catatan bahwa “perang” antar-Kurdi untuk merebutkan wilayah kekuasaan dan pengaruh di Irak Utara menjadi salah satu penyebab mudahnya Saddam menguasai daerah itu. Selalu ada kelompok dan partai politik yang dipengaruhi oleh Saddam.<sup>7</sup>

Kedua partai politik itu menguasai sebagian besar wilayah di tiga provinsi wilayah utara, yakni Erbil, Duhok, dan Sulaymaniah. Wilayah tersebut dikuasai mereka sejak tentara Baghdad menarik pasukannya. Kekosongan ini sangat dimanfaatkan oleh Kurdi untuk merebut kembali kota yang tersebut, selain itu moment itu sangat tepat bagi Kurdi karena bertepatan dengan pemberontakan kaum Syiah di selatan yang merupakan kaum mayoritas di Irak namun mendapatkan tindakan diskriminasi oleh Saddam Hussein.

Kedua partai yang lahir dari Kurdi ini patut disyukuri oleh Bangsa Kurdi di Irak Utara, karena mereka memberikan harapan baru bagi terciptanya persatuan dan kesatuan Kurdi. Menunjukkan bahwa Kurdi selangkah akan maju dari sebelumnya dan menuju arah perubahan yang lebih demokratis, yang merupakan cita-cita awal orang kurdi sendiri.

Hingga enam dasa warsa kemudian, aspirasi kemerdekaan etnis Kurdi belum pernah padam. Sampai pada saat Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan di Irak dengan dalil untuk menegakkan demokrasi dan menjatuhkan kepemimpinan Saddam Hussein yang selama ini dipandang oleh dunia sangat kejam dan otoriter. Etnis Kurdi merasa mendapatkan udara segar dibalik aksi serangan Amerika Serikat

dan Inggris. Tentu saja ini adalah moment yang paling ditunggu-tunggu oleh kaum tertindas di Irak pada masa pemerintahan Saddam seperti Etnis Kurdi dan Kaum Syiah yang selalu mendapatkan sikap diskriminasi di Irak.

Alasan dari serangan yang dilancarkan oleh George W. Bush bersama Tony Blair terhadap Saddam Hussein adalah karena pemimpin itu bertindak diktator dan tidak demokratis. Sekilas, alasan tersebut mulia karena akan menyelamatkan rakyat Irak dari tindakan sewenang-wenang suatu rezim kepemilikan Irak, selain itu alasan lainnya yaitu atas kepemilikan senjata pemusnah massal. AS menyongsong misi untuk menegakkan demokrasi yang alih-alih akan menumbangkan rezim Saddam dan memerdekakan kaum tertindas di Irak. Irak akan menjadi pelopor pertama bagi kebangkitan demokratisasi di negara-negara islam lainnya di Arab. Atas dasar inilah yang membuat AS dapat dengan mudah melakukan serangan dan pengejaran terhadap Saddam.

Gerakan pemberontakan kaum Kurdi di Irak utara cenderung meningkat sebagai salah satu komplikasi serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Irak. Gerilyawan Kurdi diyakini menggunakan momentum serangan AS-Inggris untuk meningkatkan perjuangan melepaskan diri. Dari peristiwa ini tentunya Kurdi tidak ingin melewatkan begitu saja, karena harapan jelas untuk mendapatkan posisi politik di Irak. Tetapi Kurdi tidak lantas terbuai dengan tujuan AS untuk memberikan demokrasi terhadap Irak baru, maka Kurdi dan Syiah menyatakan dengan tegas menolak atas kependudukan yang dilakukan AS terhadap Irak pasca kekosongan kepemimpinan.

Pasca jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003 yang ditandai dengan

hari raya orang muslim yaitu Idul Adha . Menambah aroma wangi bagi kaum tertindas di Irak sekaligus kesedihan bagi pendukung Saddam, apalagi presiden Bush dan dan PM Tony Blair telah menjanjikan kepada Irak pasca Saddam, dapat menentukan nasib mereka sendiri. Sudah tentu Etnis Kurdi merupakan bagian didalamnya yang akan ikut berperan untuk menentukan nasib pemerintah Irak selanjutnya.

Selama runtuhnya rezim Saddam, Kurdi mulai mencicipi manisnya buah kesabaran yang ditanam selama ini karena dalam selang waktu dua tahun pasca Saddam Irak untuk pertama kalinya mengadakan pemilu. Tentu dalam pemilu kali ini partai-partai yang menyongsong Kurdi tak mau tertinggal dalam pesta demokrasi Irak. Pada 30 Januari 2005 merupakan hari bersejarah bagi rakyat Irak. Setidaknya itu yang terbersit dari pelaksanaan Pemilihan Umum di Irak pasca runtuhnya pemerintahan Saddam. Pemerintahan sementara yang dipimpin PM Iyad Allawi menyebutkan sedikitnya 60 persen rakyat berpartisipasi dalam pemilu saat itu.

Partai-partai besar Kurdi seperti Uni Patriotik Kurdistan (UPK) dan Partai Demokrasi Kurdistan (PDK) menyambut dan berpartisipasi meramaikan pesta demokrasi yang pertama di Irak pasca jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2005 yang merupakan tantangan semua kekuatan politik di Irak, termasuk kekuatan politik Kurdi. Posisi strategis adalah incaran dan target utama dari para pejuang partai-partai Kurdi yang akan memperjuangkan nasib Irak baru pada umumnya dan wilayah Kurdi khususnya.

Untuk menyambut pesta demokrasi pertama di Irak, Kurdi tampak begitu siap diantara pesaing lainnya. Untuk mendapatkan posisi strategis di Irak kali ini mereka

guna mendukung mereka menjadi peraih suara tertinggi di Irak. Akan banyak upaya atau cara yang dilakukan Kurdi untuk meraih ambisinya mendapatkan posisi Presiden.

Dalam pemilu pertama pasca Saddam yang dilaksanakan di Irak pada 30 Januari 2005 merupakan pembuktian atas kerja keras termasuk pengorbanan air mata dan darah dari Etnis Kurdi, karena melalui pemilu tersebut Kurdi di bawah Aliansi Partai Utama Kurdi berhasil meraih posisi kedua setelah Syiah. Mereka mendapatkan 75 Kursi dari 275 kursi yang tersedia di parlemen. Tentunya perolehan tersebut tidak cukup untuk menguasai berbagai jabatan penting di Irak. Maka akan banyak upaya lanjutan yang akan Kurdi pilih untuk memuluskan keinginan mereka mendapatkan posisi tinggi di Irak terutama kedudukan Presiden yang ditargetkan oleh Kurdi untuk diraih pasca Saddam.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana upaya Kurdi memperoleh peran politik dalam pemilu di Irak pasca rezim Saddam Hussein ?

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Untuk menjelaskan pokok permasalahan, bagaimana upaya Etnis Kurdi memperoleh posisi Presiden dalam pemilu di Irak pasca rezim Saddam Hussein, penulis menggunakan beberapa kerangka pemikiran sebagai acuan. Kerangka pemikiran adalah kumpulan konsep dan teori-teori yang digunakan untuk

lebih memahami apa yang ditelitinya, dalam hal ini kerangka pemikiran yang penulis gunakan adalah Teori Partai Politik dan Teori Koalisi.

Seorang sarjana barat yang bernama Sigmund Neumann memberikan batasan partai politik sebagai berikut : "Partai Politik adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda." <sup>8</sup> Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi social dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Suatu batasan yang jauh lebih sederhana dari batasan yang dikemukakan oleh Neumann, dikemukakan oleh R. H. Soltau. Dalam hal ini Soltau menyatakan bahwa : "Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak yang terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka."

Berdasarkan pada batasan-batasan yang dikemukakan oleh para sarjana, seperti tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan partai politik pada hakekatnya merupakan sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, memiliki cita-cita, tujuan dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat, sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik ataupun pemerintahan, dan

---

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo (ed), *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1981, hal 14.; mengutip pendapat Sigmund Neumann di dalam bukunya "Modern Political Parties."

kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijakannya dengan jalan menempatkan anggotanya didalam jabatan-jabatan politik ataupun pemerintahan. Mengenai cara yang dipergunakan partai politik agar dapat memperoleh kekuasaan tadi dan kemudian menduduki jabatan politik ataupun pemerintah dengan melalui cara yang konstitusional seperti ikut serta dalam pemilihan umum, maupun dengan cara yang inkonstitusional (jarang terjadi), seperti mengadakan pemberontakan.

Dalam mencapai sebuah kejayaan pastinya semua harus melalui tahapan, serupa halnya dengan bagaimana sebuah partai politik dapat meraih kekuasaan, pastinya dengan melalui sebuah upaya. Upaya sebuah partai politik tidak hanya dengan ikut pemilihan umum, lantas mendapatkan kekuasaan, tetapi cara lainnya seperti : menjalankan fungsi-fungsinya dengan menyeleksi calon-calon perwakilan, ikut berkampanye. Adapun upaya lain yang akan partai politik lakukan untuk mendapatkan sebuah posisi strategis dengan perolehan suara mayoritas, partai politik dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain untuk mendongkrak kedudukannya dan mengalahkan lawan meraka.<sup>9</sup>

Menurut Hermawan Sulisty, Koalisi adalah penyatuan dua partai atau lebih.<sup>10</sup>

Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai.<sup>11</sup> Dalam buku prospek dan tantangan partai politik, kabinet koalisi dipercaya sebagai cara terbaik untuk mencapai pemerintahan

---

<sup>9</sup> Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 87

<sup>10</sup> "Wisata Bahasa", (akses 25 September 2007 ), [www.google/definisi/koalisi.com](http://www.google/definisi/koalisi.com).

<sup>11</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Koalisi>

moderen. Lebih dari itu koalisi memberi kesempatan bagi partai kecil untuk ikut serta dalam pemerintahan. Koalisi beberapa partai merupakan upaya untuk mengimbangi atau mengungguli kekuatan yang lebih dominan dalam suatu negara.

Cara suatu partai memenangkan pemilu dengan berkoalisi dengan partai lain memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan. Koalisi beberapa partai dapat menyusun pemerintahan baru jika jumlah suara pendukungnya mencapai jumlah mayoritas.<sup>12</sup>

Koalisi partai untuk seorang calon presiden diperlukan, mengingat kecilnya peluang seorang calon presiden dari sebuah partai mendapat suara mutlak dalam pemilu nanti. Koalisi membantu mengurangi ketidakpastian siapa yang akan menang dalam pemilihan presiden nanti. Koalisi ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa dukungan terhadap partai politik sering terkait erat dengan dukungan terhadap calon presiden dari partai bersangkutan.<sup>13</sup>

Di samping itu, partai politik adalah mesin politik yang punya daya mobilisasi massa paling sistematis. Karena itu, koalisi antarpolitical diharapkan berperan sebagai mesin politik besar untuk memobilisasi massa pemilih presiden yang dicalonkan. Tidak ada organisasi sosial-politik yang punya kemampuan mobilisasi massa secara nasional sebesar partai politik.

Sebuah koalisi partai dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan platform di antara partai yang akan berkoalisi tersebut. Platform yang dimaksud termasuk dalam masalah agama dan ekonomi. Tapi, koalisi juga bisa

---

<sup>12</sup> Bambang Cipto, *Prospek dan tantangan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, 1996. Hal 5, P.

<sup>13</sup> "KOALISI PARTAI UNTUK PRESIDEN", TEMPO No. 44/XXXII/29 Desember - 04 Januari 2003 diambil dari : [www.freedominstitute.com](http://www.freedominstitute.com)

dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi.<sup>14</sup>

Kurdi adalah salah satu kelompok masyarakat di Irak yang memiliki organisasi politik yang sudah berakar jauh didalam masyarakat Irak khususnya Irak bagian Utara, memiliki cabang-cabang didaerah, memiliki ideologi pemersatu bangsa dan memiliki kegiatan secara bersinambungan, juga ikut serta dalam pemilihan umum dan memiliki wakil diparlemen, dengan demikian Kurdi memiliki peran politik di Irak walaupun masih sangat kecil. Kurdi sudah memiliki partai politik sejak sebelum era Saddam, namun keberadaan mereka pada masa Saddam mendapatkan banyak tekanan dan termarginalkan dalam posisi politik di Irak, selain tidak mendapatkan posisi dalam pemilu Irak, mereka juga kerap dirundung tuduhan sebagai kelompok separatism yang harus dibumi hanguskan. Semua akhirnya berakhir pasca Invasi AS ke Irak, Kurdi mendapatkan banyak angin segar dan menunjukkan geliatnya dikancar perpolitikan di Irak. Mereka tampil sebagai kelompok yang siap menghadapi proses pendemokrasian di Irak yang telah dicitatakan oleh seluruh rakyat Irak

Kurdi sebagai salah satu kelompok masyarakat di Irak yang otomatis telah mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam politik pasca Saddam, tidak akan melepaskan segala kesempatan yang akan diraihinya. Mereka yang telah lama mengorganisasikan diri mereka kedalam sebuah partai politik berbasis Kurdi yang akan memperjuangkan kedudukan Kurdi, juga menyuarakan aspirasi rakyat Kurdi khususnya yang sudah lama merasakan ketertindasan pada Saddam dan pemimpin sebelumnya. Tidak dapat terpungkiri lagi jika sebuah partai politik akan



Sehingga parpol berbasis Kurdi akan bersaing dengan kelompok-kelompok lain di Irak untuk mendapat posisi strategis demi mempertahankan eksistensi politik mereka di Irak.

Begitu banyak partai politik yang muncul sebagai penyambung lidah Kurdi namun hanya dua partai besar Kurdi yang mendapatkan perhatian besar dari rakyat. Partai-partai besar Kurdi seperti Uni Patriotik Kurdistan (UPK) dan Partai Demokrasi Kurdistan (PDK) yang berdiri pada tahun 1946 oleh Mustafa Barzani, pastinya mereka akan saling bersaing dalam mencari dan mendapatkan kekuasaan Irak walaupun mereka memiliki satu asal dan alasan yang sama, tetapi memiliki cara dan ideologi yang berbeda terhadap tujuan untuk mendapatkan posisi tertingginya di Irak.

Seperti salah satu dari fungsi Parpol adalah "Partisipasi Politik" yang memiliki pengertian sebagai : kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah.<sup>15</sup> Atas pernyataan langsung yang dinyatakan oleh Bush dan Tony Blair " bahwa rakyat di Irak dapat menentukan nasib mereka sendiri", pastinya didalam termasuk Kurdi pula dapat berpartisipasi dalam membangun Irak yang baru yang diharapkan akan berjalan dengan demokratis.

Untuk mendapatkan kekuasaan dalam sebuah pemerintah maka partai politik yang ada di Irak termasuk PUK dan PDK juga partai politik lainnya ikut serta dalam pemilihan umum, berkampanye dan berlomba mencari perwakilan atau calon terbaik partai politik mereka sehingga mendapatkan simpatik dari masyarakat dan akan berpengaruh pada jumlah suara yang diperoleh. Tentunya untuk mendapatkan kekuasaan, sebuah partai harus memenangkan suara terbanyak.

---

<sup>15</sup>Partisipasi Politik, M. L. ...

Pemilu di Irak banyak diikuti berbagai kelompok atau parpol. Meskipun demikian, dapat dikenali dengan mudah bahwa sebenarnya ada tiga kekuatan yang sedang bersaing untuk merebut posisi politik tertinggi, yakni kekuatan Kurdi, Syiah dan Sunni. Kekuatan kelompok Kurdi berada dibawah Aliansi Partai Utama Kurdi yang meraih 25,7% suara (75 kursi) dipimpin oleh Jalal Talabani memegang peringkat kedua setelah partai koalisi Aliansi Irak Bersatu yang didukung Ayatullah Ali al-Sistani berhasil meraih kemenangan dengan 48,1% suara (132 kursi).<sup>16</sup>

Pada pemilu tersebut sudah dapat diketahui bahwa sang mayoritas Syiah akan mendapat suara terbanyak mengingat mereka adalah kaum mayoritas. Tetapi suara yang didapatkan oleh kelompok Syiah belum begitu kuat untuk mendapatkan kedudukan Perdana menteri. Mengingat perolehan kursi diparlemen tidak mutlak (140 kursi), UIA (Aliansi Irak Bersatu) harus mengajak kelompok Kurdi yang memiliki 75 kursi untuk berkoalisi. Koalisi ini diharapkan mampu meloloskan nama calon perdana menteri yang dijagokan.

Menurut teori, dua pertiga suara parlemen dibutuhkan dalam pemilihan presiden dan dua wakil presiden. Kewenangan sebenarnya bukan berada di tangan presidium, melainkan di tangan perdana menteri dan pemerintahannya. Pengangkatan perdana menteri sebenarnya hanya memerlukan mayoritas parlemen. Namun karena calon perdana menteri harus secara unanimitas ditunjuk oleh presiden dan kedua wakilnya, maka pada prakteknya pemerintah pun membutuhkan dua pertiga suara itu.

Bagi Kurdi ini adalah tawaran yang menggiurkan dan sangat menguntungkan karena Kurdi akan mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Irak dan mampu menjadi kaum mayoritas. Kelompok Syiah yang menduduki 140 dari 275 kursi

parlemen adalah pemenang terbesar dalam pemilihan lalu. Namun perolehan kursi itu belum cukup untuk membentuk pemerintahan, karena untuk itu dibutuhkan dua pertiganya. Menghadapi kenyataan ini, kaum Kurdi mengaggap merekalah pemegang posisi kunci. Mungkin ini adalah pertama dan terakhir kalinya kalangan Kurdi bisa memegang posisi kunci dalam proses politik Irak. Mereka bertekad betul menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan masa depan federasi Irak. Mereka ingin otonomi penuh di wilayah yang dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Saddam Hussein berhasil mereka rebut, berkat bantuan Amerika Serikat yang melindungi zona larangan terbang.<sup>17</sup>

Koalisi yang terjadi antara Kurdi dan Syiah ini pula tentu sangat diharapkan akan membawa salah satu wakil dari partai Kurdi untuk mendapatkan posisi tertinggi, sehingga diharapkan dapat memperjuangkan otonomi yang telah didapatkan oleh kurdi.

Akhirnya pada tahun 2006 Pemilihan itu berlangsung, setelah sembilan pekan parlemen menghadapi hambatan untuk membentuk koalisi pemerintahan maka Talabani terpilih oleh parlemen, yang terdiri dari 275 kursi, yang merupakan kemenangan politik sangat besar bagi etnis minoritas Kurdi, yang telah lama menderita akibat penindasan rezim Saddam Hussein yang terguling.

## **F. Hipotesa**

Upaya Kurdi memperoleh posisi strategis di Irak pada pemilu pertama pasca Saddam adalah dengan usaha mereka menjadi sebuah partai politik yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga mendapatkan simpatik dan dukungan suara dari masyarakat Irak dan berusaha meyakinkan pengamatan Luar negeri

---

<sup>17</sup>Wahid, op. cit. hal. 5-6

terhadap kemampuan dan keinginan Kurdi berperan dalam politik Irak baru yang lebih baik.

Aliansi Partai Utama Kurdi dalam pemilu pertama pasca Saddam, memperoleh hasil suara yang berada pada posisi kedua setelah Syiah maka Kurdi menerima usaha Syiah untuk berkoalisi dengan harapan agar Kurdi mendapatkan posisi strategis seperti “Presiden” dalam politik Irak Pasca Saddam Hussein.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Penulis ini memiliki batasan waktu antara saat pra-penyerangan AS ke Irak tahun 2000 hingga diadakannya pemilu 30 Januari 2005, hal tersebut dikarenakan dua peristiwa tersebut sangat mempengaruhi perubahan posisi dan Peranan Etnis Kurdi di Irak. Namun, tidak menutup kemungkinan terhadap peristiwa-peristiwa yang masih relevan, meskipun terjadi diluar tahun tersebut.

#### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan studi pustaka, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder, karena penulis melakukan studi pustaka maka penulis mengambil referensi berupa buku-buku literature, jurnal, Koran, majalah dan internet.

#### **I. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I**

Berisi tentang : Alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang

Masalah, Dampak, Dan Penyelesaian Masalah, Kesimpulan, dan Saran

Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Sistematika  
Penulisan

**BAB II**

**Berisi tentang :** Garis besar sejarah Etnis Kurdi. Keberadaan nasib Etnis Kurdi pada masa rezim saddam. Peranan politik Etnis Kurdi di Irak pada masa Pra dan Era Saddam, sejauh mana Kurdi memperoleh peran politik.

**BAB III**

**Berisi tentang :** Isu demokratisasi yang disongsong oleh AS sebagai dalil penyerangannya ke Irak. Juga sejauh mana keterlibatan atau peran Kurdi ditengah serangan AS ke Irak. Sekaligus menguak tentang sistem pemilu di Irak Era dan pasca Saddam.

**BAB IV**

**Berisi Tentang :** Upaya-upaya partai Kurdi memperoleh simpati masyarakat Irak dengan menggunakan strategi menyatukan dua kekuatan PUK dan PDK. Kurdi berkoalisi dengan Syiah untuk mendapatkan posisi strategis di Irak dan membagi kue kekuasaan dengan baik (Sharing power Kurdi-Syiah).

**BAB V KESIMPULAN**